

Dinamika Pembangunan Nasional di Era Pandemi

Muhammad faris Notonegoro¹, Riskey Eko Budi Prasetyo Putro², Mahendra Eka Sakti³, Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A.

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Faris.notonegoro@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Riskeyekobudi@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Mahendrae65@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Ponorogo darwisnasution69@gmail.com

Abstract.

In order to achieve prosperity in various countries and fulfill various development plans to create a better world, world leaders make a decision that is contained in the Sustainable Development Goals and better known in English called SDG's (Sustainable Development Goals) which has been approved by several Countries participating in the forum organized by the United Nations were followed and jointly proclaimed by intergovernmental countries in a United Nations resolution issued on October 21, 2015 as a joint development ambition until 2030. However, since the end of the 2019 period until today, the Covid 19 pandemic has become a separate problem. in realizing it with various impacts that affect the central sector such as the economy that supports various human needs, then has an impact on other sectors as a whole. This journal describes the impact of Covid-19 on development globally and its correlation in Indonesia today with a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of this study show the implications of Covid-19 on the development and continuation of national development and how the government's strategic policies are to advance Indonesia's current development and its correlation to sustainable development goals.

Abstrak.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai Negara dan memenuhi berbagai rencana pembangunan guna mewujudkan dunia yang lebih baik para pemimpin dunia melakukan sebuah keputusan yang termaktub pada Tujuan pembangunan berkelanjutan dan lebih dikenal dalam bahasa inggris di sebut SDG's (Sustainable Development Goals) yang telah di setujui oleh beberapa Negara yang berpartisipasi pada forum yang diselenggarakan oleh PBB diikuti dan dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Namun sejak akhir periode 2019 hingga hari ini Pandemi Covid 19 menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkannya dengan berbagai dampak dampak yang berpengaruh pada sektor sentral seperti ekonomi yang menopang berbagai kebutuhan manusia, kemudian berdampak pada sektor sektor lain secara keseluruhan. Jurnal ini memaparkan dampak dari Covid-19 terhadap pembangunan secara global dan korelasinya di Indonesia saat ini dengan Metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan implikasi Covid-19 terhadap perkembangan serta kelanjutan dari pembangunan Nasional dan bagaimana kebijakan strategis pemerintah guna memajukan pembangunan Indonesia saat ini dan korelasinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Latar Belakang

Setiap elemen di dalam tubuh NKRI dari pemerintahan hingga elemen terbawah ingin akan adanya implementasi sila ke 5 pada pancasila yang mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' maka pembangunan demi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ialah sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Pemerintahan dengan berbagai lembaganya berkewajiban mengatur dan mencanangkan sebuah pembangunan di berbagai sektor mulai dari infrastruktur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan berbagai sektor lainnya yang mana berpengaruh pada setiap kehidupan rakyat secara langsung.

Lembaga lembaga Negara bertanggung jawab penuh atas setiap sektor yang dibawahnya kepada lembaga lainnya antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebagai sistem politik yang telah disetujui bersama, dan salah satu lembaga Eksekutif berbentuk kementerian yang bertanggung jawab atas rencana dan haluan pembangunan secara Nasional ialah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang mana kementerian tersebut bertugas untuk merencanakan pembangunan makro serta menjadi acuan pada lembaga pembangunan di bawahnya yang sifatnya kedaerahan memiliki tugas besar sebagai perencana akan akan sukseksi pembangunan yang ada salah satunya tertuang pada RPJMN 2020-2024 sebagai wujud dan bentuk usaha pembangunan. Namun rencana tersebut harus disesuaikan dengan keadaan serta permasalahan yang datangnya tidak dapat di prediksi sebelumnya layaknya adanya pandemi Covid-19.

Dengan adanya virus Corona yang terus berkembang dan menjadi pandemi menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan, dikarenakan efeknya yang mempengaruhi perekonomian secara global sehingga berimplikasi langsung terhadap berbagai pembangunan yang ada, virus corona memaksa masyarakat untuk membatasi ruang gerak mereka dikarenakan penyebarannya melalui media udara yang meningkatkan jumlah penderita dan cluster baru dalam penularannya,oleh karena itu pemerintah mengambil langkah dan kebijakan berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala besar atau biasa di sebut dengan PSBB berdasar (UU) Nomor 6 Tahun 2018 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut dimaksudkan guna menekan angka penyebaran dari pandemic Covid-19.

Untuk keberlanjutan pembangunan pemerintah melalui lembaga lembaganya harus berupaya dengan semaksimal mungkin guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat, walau pandemi menjadi tantangan tersendiri dalam keberlangsungan pembangunan optimisme seluruh elemen Negara dengan semangat Nasionalisme harus tetap dijaga agar terwujudnya cita cita dari sebuah pembangunan yang di asaskan pada kesejahteraan rakyat.

Metode Penelitian

Pada pembuatan jurnal ini menggunakan Metode kualitatif dan analisis kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif reduksi data dan display data. Dengan tujuan pendekatan ini adalah untuk menyuguhkan dan menggambarkan data yang berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan Dinamika Pembangunan Nasional di Era Pandemi, data yang digali menggunakan kajian literature dari penelitian sebelumnya dan beberapa narasumber yang berkaitan dengan tema yang dipilih.

Hasil dan Pembahasan.

SDG'S dan Dilematika Pembangunan Nasional.

Bahwa pembangunan merupakan bahan perhatian dan menjadi pusat dari berbagai Negara di belahan duni untuk itu beberapa upaya di canangkan guna mewujudkan sebuah pembangunan berkelanjutan untuk itu beberapa usaha terkait dengan pembangunan tertuang dalam dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) atau Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan global yang secara resmi disahkan para pemimpin dunia. Indonesia juga menjadi partisipan dalam penyusunan dokumen tersebut tercatat 193 kepala negara hadir, termasuk wakil presiden Indonesia. Pertemuan tersebut di adakan mengangkat dengan tema "Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan" yang memuat 17 tujuan dan 169 target merupakan agenda dan rencana global untuk 15 tahun kedepanyang berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mewujudkan kesejahteraan serta lingkungan hidup yang baik bagi manusia secara keseluruhan. SDGs memiliki prinsip tidak Meninggalkan Satu orangpun dalam artian melibatkan elemen elemen yang ada untuk berpartisipasi pada sebuah rencana pembangunan. Dengan disetujuinya prinsip tersebut agenda pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada persoalan keadilan terkait prosedural yaitu sejauh mana pihak yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan substansi keadilan yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab permasalahan warga dan menjadi solusi atas berbagai masalah pembangunan yang ada.

Dengan adanya rencana tersebut kepemimpinan dunia di uji untuk mengatasi problematika pembangunan secara global, dan setiap Negara yang menjadi partisipan dalam forum tersebut juga harus mempertanggung jawabkan atas agenda yang telah disepakati oleh 193 kepala Negara tersebut, tentunya regulasi yang mendukung serta partisipasi aktif dari berbagai pihak dan elemen dari level desa hingga pemerintahan pusat harus terintegrasi dan saling bahu membahu untuk menyelesaikan agenda pembangunan Nasional hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara dan diantaranya Indonesia menyepakati 17 tujuan yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being) Menggalakkan hidup sehat dan mendukung semua kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education) Memastikan Pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation) Menjamin akses atas air dan sanitasi semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan untuk semua.
9. Industri Inovasi dan Infrastruktur Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara – negara.
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim, Mengambil Langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem Laut, Pelindungan dan penggunaan Samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan, Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan rehabilitasi kerusakan lahan.
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Mendorong masyarakat adil, damai dan inklusif.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, Menghidupkan Kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dirujuk dari tujuan yang pertama SDG's yakni mengentaskan kemiskinan seolah menjadi PR berat dan problem yang tak kunjung selesai bagi Indonesia dikarenakan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan hingga hari ini. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya pada 2020 data dari BPS (badan pusat statistik) menyatakan Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71

persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Namun angka kemiskinan masih relative tinggi yaitu berada pada Jumlah 26,50 juta tercatat miskin yang mana puluhan juta penduduk di negeri ini masih di dera oleh kemiskinan data ini juga diperoleh dari BPS menyebut jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Ancaman akan naiknya angka kemiskinan akan terus ada apabila pandemi Covid 19 terus melanda negeri ini, Jadi pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah serius mengenai angka kemiskinan beserta 16 elemen pembangunan berkelanjutan dengan permasalahannya di setiap tujuan tersebut di yang mana harus di entaskan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang termaktub pada pancasila sebagai tujuan dan landasan ideologis bernegara.

Pada akhir kuartal 2019 pandemi covid 19 mewabah hingga keseluruh dunia dan menjadi momok tersendiri bagi pembangunan, Indonesia menjadi salah satu Negara yang terimplikasi dari adanya pandemi secara global. Pemerintah Indonesia merubah kebijakan karantina wilayah (lockdown) dengan menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal disesuaikan dengan tingkat penderita di wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Dengan adanya pandemi ini, pembangunan dunia secara global termasuk Indonesia mengalami perlambatan sebagai implikasi dari pandemi yang menyerang sektor ekonomi. Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan New Normal agar dampak pembangunan akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana pemerintah sudah menetapkan program Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah pada New Normal ini pemerintah memiliki 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang pada RPJMN 2020 – 2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan New Normal dalam pandemi covid 19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi dan prediksi yang diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi covid 19. Ketiga, merombak seluruh program dan target yang ditetapkan berdasarkan asumsi dan perkembangan baru pasca covid 19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul akibat covid-19. Pembangunan. Sistematis pembangunan dari internasional hingga nasional terlihat dengan adanya kesepakatan pada pertemuan dan forum SDGs tersebut dengan berbagai gejolak yang ada saat ini apakah mampu Negara Negara berkembang seperti Indonesia dapat memenuhi target tersebut, penulis berasumsi bahwa kemungkinan masih tetap ada apabila perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah benar benar tepat dan mengenai sasaran serta perekonomian masih tetap stabil dalam mengawal berbagai pembangunan yang ada, karena tidak dapat dipungkiri bahwa suksesi dari berbagai pembangunan yang ada sangat bergantung pada sektor ekonomi yang amat vital.

Dampak Covid Terhadap Sektor Ekonomi.

Sektor ekonomi menjadi vital dalam sebuah keberlangsungan dalam kehidupan bernegara dimana ia menjadi roda kehidupan daripada sektor sektor lain yang ditopang oleh nilai Ekonomis, ancaman akan adanya resesi akibat efek daripada pandemi menjadi pusat dan titik perhatian tersendiri dikarenakan berbagai laporan dari salah satu lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa potensi akan terjadinya perlambatan

ekonomi dunia secara global pada tahun 2020. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Pada akhir 2018 total stok utang negara-negara berkembang mencapai 191 persen (atau hampir dua kali lipat) PDB gabungan mereka, level tertinggi yang pernah tercatat. Krisis utang negara berkembang, yang sudah berlangsung sebelum guncangan Covid-19. lembaga keuangan dunia IMF (international monetary fund) memiliki dua hal yang patut diketengahkan dalam konteks perdebatan tentang pengurangan utang untuk negara berkembang setelah guncangan Covid-19 guna pemulihan kondisi perekonomian Negara Negara berkembang. Perkembangan perekonomian Indonesia juga dapat dilihat melalui PDB riil sepanjang masa pandemi dikuartal tahun 2019-hingga tahun 2020 yang mana mengalami indeks penurunan yang mana dapat dilihat daripada tabel dibawah ini.

Tabel .1

PDB RIIL INDONESIA			
2019	2020		
Q1	Q1	Q2	Q3
4,97%	2,97 %	-5,32 %	-3,49 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (data dirangkum penulis)

Dari tabel tersebut dapat kita pahami bahwa penurunan kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal ketiga terus mengalami penurunan yang signifikan dimana dari tabel tersebut menunjukkan penurunan pertama dimana dari kuartal I 2020 menurun sebesar 2 % dari Kuartal sebelumnya, kemudian penurunan tersebut berlanjut pada pertengahan tahun dan pada kuartal kedua PDB Indonesia mengalami penurunan secara signifikan hingga ke angka minus -5,32%. Kemudian pada kuartal berikutnya meskipun mengalami kenaikan dari kuartal sebelumnya, namun hal tertentu masih belum bisa mengentaskan PDB dari angka minus, Yakni -3,49%. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan Produk domestik Bruto, gejala resesi sudah muncul, sebagai indikator utama bahwa PDB turun secara dua kuartal berturut-turut dari kuartal I hingga kuartal III 2020. Dari penurunan tersebut menunjukkan akan adanya ancaman resesi apabila pemerintah tidak cepat mengatasi hal tersebut, indikator PDB menjadi sesuatu hal yang urgent guna mendeteksi akan adanya ancaman resesi akibat dampak daripada pandemi virus Covid-19. Ancaman akan adanya resesi sebagai dampak dari pandemic Covid-19 menjadi bayang bayang tersendiri dalam pembangunan di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh bendahara Negara Sri Mulyani dengan pernyataanya, hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran -1,1 persen hingga tumbuh positif 0,2 persen. Menteri keuangan itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang akan cenderung masuk ke skenario batas bawah. Dengan pernyataan tersebut maka perekonomian Nasional akan masuk definisi resesi secara teknis, yakni perekonomian negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebab, pada kuartal II tahun lalu, pertumbuhan ekonomi RI berkontraksi cukup dalam, yakni -5,32 persen. kemudian data survey terkait dengan perekonomian yang berdasarkan pada hasil SPIME triwulan II-2020, responden menyatakan kinerja perekonomian Indonesia lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020

tumbuh sebesar 0,03%(yoy) menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5,02% (yoy). Penyebab hal tersebut tak lain ialah melemahnya perekonomian secara global, sehingga berimplikasi terhadap penurunan daya beli masyarakat secara umum, turunya daya beli masyarakat merupakan efek dari penerapan protocol Kesehatan serta adanya karantina wilayah sehingga kebiasaan yang baru merubah pola hidup masyarakat pandemic saat ini dan secara langsung mempengaruhi cara dan budaya jual beli di masyarakat. Masyarakat di era pandemic juga berfikir akan efisiensi terkait kebutuhan hidup dimana kebutuhan primer lebih penting di banding kebutuhan sekunder, belum lagi pandemi juga mengakibatkan turunya pendapatan masyarakat secara global sehingga lesunya perekonomian pasca pandemic lumrah terjadi dan berpengaruh pada pangsa pasar.

Ekonomi nasional yang terimplikasi oleh adanya pandemic covid-19 mengakibatkan berbagai persoalan dan salah satu pemasok ekonomi nasional adalah dengan adanya sector pariwisata melalui devisanya, dengan melemahnya sector pariwisata nasional tentu hal ini juga menjadi persoalan ekonomi bagi suatu negara. Karena negara yang tersohor melalui pariwisatanya akan menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama dalam pemasukan ekonomi melalui pajak dan perdagangan serta transportasi lintas negara yang menyertainya, jika pariwisata suatu negara melemah maka hal ini juga berpengaruh besar perekonomian di suatu negara yang mendapatkan income tinggi dari wisatanya.

Di tengah maraknya penyebaran dari virus Covid-19 di negeri ini kebangkitan ekonomi Nasional menjadi kunci utama dari suksesti pembangunan yang ada karena APBN dari suatu Negara perlu di alokasikan dengan berbagai pertimbangan tepat guna. Maka suksesti pembangunan Nasional secara menyeluruh tidak akan terwujud apabila pandemi masih menjadi ancaman tersendiri, terlebih untuk saat ini pemerintah memfokuskan APBN untuk mitigasi Covid-19. Tentunya inovasi serta ide baru mengenai kebangkitan ekonomi selalu di nanti guna mengentaskan masalah perekonomian itu sendiri.

Dampak Covid Terhadap Sektor Pariwisata

Peran sektor pariwisata dalam perekonomian suatu Negara memiliki nilai urgensi tersendiri, terlebih sektor pariwisata menyokong adanya kebijakan pemerintah guna pembangunan sektor ekonomi yang memiliki nilai investasi tinggi untuk perkembangannya di masa depan. Pariwisata memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi negeri ini dengan sejuta keindahannya memiliki nilai lebih dalam sektor pasar wisatawan secara global.

Pariwisata dunia menjadi salah satu pemasok pajak tertinggi dari visa khususnya bagi Negara Negara berkembang dengan potensi wisata yang tinggi seperti Indonesia. Infrastruktur yang mendukung serta pengelolaan yang bagus menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan minat wisatawan juga di gaungkan oleh pemerintah pusat hingga daerah gunung. Dengan adanya covid 19 berdampak di pariwisata di Indonesia pendapatan Negara mengalami penurunan yang sangat drastis karena parawisatawan tidak di bolehkan keluar dari rumah, selaian itu pekerja di sektor wisata di liburkan atau pengurangan jam kerja oleh pengelola atau penanggung jawab. sektor pariwisata sangat berpengaruh di nusantara tidak hanya di parawista saja para penyedia layanan tranportasi juga mengalami penurunan yang sangat tajam banayak pengusaha yang mengalami gulung tikar.

Virus Covid-19 yang menjelma menjadi pandemic merupakan ancaman bagi pariwisata secara global, dengan adanya regulasi untuk menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kunjungan luar negeri serta di terapkannya karantina wilayah membuat tempat wisata menjadi sepi dan layu bahkan hingga gulung tikar, banyak juga sektor usaha lain seperti perdagangan yang terlibat di dalamnya juga terimbas akibat regulasi tersebut, pandemi ini merupakan malapetaka bagi seluruh pariwisata serta elemen elemen yang terikat di dalamnya secara global, terbengkalainya pengelolaan infrastuktur tempat wisata akibat lesunya perekonomian juga ancaman terhadap suatu tempat pariwisata tersebut, beberapa Negara yang memiliki angka penderita tinggi tidak memperbolehkan wisatawan mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata karena Negara tersebut menerapkan lockdown sebagai langkah terkait mitigasi dari pandemi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisata di tengah pandemic merupakan bunuh diri bagi para wisatawan yang akan melancong ke suatu tempat wisata dengan berbagai pertimbangan yang ada seperti kesehatan dan lain lainnya

Data terkait menurunnya pariwisata secara global disampaikan oleh salah satu organisasi pariwisata dunia (UNWTO) yang pada bulan Maret 2020 memberikan pernyataan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata secara global. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US \$ 30 miliar sampai dengan US \$ 50 miliar. Sebelum wabah Covid-19, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh antara 3% sampai 4%. Asia dan Pasifik akan menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk, dengan penurunan kedatangan yang diperkirakan antara 9% hingga 12%. Lantas bagaimana dengan pariwisata Indonesia apakah negeri ini aman aman saja dari badai Covid-19 data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan turis asing pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan turis asing ini utamanya disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada pekan terakhir Januari 2020. Dari data di atas bisa kita simpulkan bahwa penurunan jumlah wisatawan berakibat pada penurunan pemasokan devisa dari sektor pariwisata kemudian akan berimplikasi pada UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang bergerak pada sektor pariwisata tersebut. Untuk itu upaya pengelolaan serta menjaga vitalitas pariwisata dalam negeri ialah menerapkan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf yaitu menerapkan pengetatan jumlah wisatawan, hingga pemberlakuan administrasi perjalanan khusus di era pandemi COVID-19 hal itu bertujuan untuk mengatasi angka penyebaran dan penekanan akan kemungkinan adanya cluster baru penyebaran virus ini dan meminimalisir mobilitas serta kerumunan masa.

Selain itu pemulihan ekonomi pasca pandemic juga hendaknya menyorot UMKM yang berafiliasi dengan pariwisata karenanya dengan bangkitnya minat wisatawan lokal maupun asing akan meningkatkan nilai jual maupun beli melalui transaksi yang ada.

Problem Rencana Pembangunan Pemerintah

Untuk menghadapi gejala pandemi Covid-19 pemerintah menyiapkan berbagai rencana terkait penanganan akan adanya pandemi seperti penyesuaian RPJMN 2020-2024 dengan adanya kebijakan New Normal, namun juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang masih menjadi kontroversial terkait pembangunan infrastruktur di era pandemi ini seperti pemindahan ibu kota dengan nama Nusantara ke Kalimantan yang masih menjadi tanda Tanya terkait urgensinya, pemberitaan mengenai hal tersebut memanas di berbagai media dengan adanya pro dan kontra dan masyarakat perlu menanyakan kembali urgensi terkait kebijakan tersebut hal itu disebabkan karena selama ini yang kita kenal Kalimantan merupakan lahan hijau dengan keanekaragaman hayati bahkan Kalimantan merupakan daerah kedua dengan luas hutanya yang akan menjadi dan penyokong dari adanya emisi perdagangan karbon. Apakah tepat pemindahan ibukota ke daerah tersebut pasca pandemic seperti ini? dalam misi pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pada nilai ekonomis saja namun juga di bahas tentang kelestarian alam serta kualitas hidup manusia itu sendiri. Pembangunan infrastruktur memang baik bagi kemajuan dan kelangsungan serta kemajuan sebuah Negara namun kelestarian alam yang menyokong kehidupan secara umum juga patut di pertimbangkan. Walaupun secara umum APBN pada tahun 2022 adalah di fokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, namun isu isu hangat terkait pemindahan ibukota tetap menjadi masalah bagi pemerintah. Oleh karena itu penulis jurnal ini beropini bahwa pemindahan ibukota di era transisi pasca pandemi dan masih dalam bayang bayang covid-19 dirasa kurang tepat, seharusnya kebijakan pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Urgensi pemulihan ekonomi dirasa hal yang paling tepat mengingat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan pasca pandemi covid-19, Terlebih lagi dengan adanya penyesuaian RPJMN 2020-2024 yang di didasarkan pada kondisi ekonomi serta bagaimana pandemic ini berakhir juga menjadikan pemerintah untuk tetap fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Selain itu pembangunan infrastruktur vital seperti pembangunan jalan dan juga pembangunan di bidang jaringan serta listrik juga masih harus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Apabila pemindahan ibukota dengan alasan ingin menghilangkan sentralisasi di Jawa seharusnya hal hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur vital terus di canangkan pemerintah khususnya di luar pulau Jawa, beberapa sektor seperti akses jalan listrik hingga pendidikan di luar Jawa masih di bawah standar dan perlu perhatian lebih, pembangunan di luar pulau Jawa juga bisa menjadi salah satu aspek pemerintah untuk memenuhi dari ketujuh belas aspek pembangunan berkelanjutan. Dan secara umum Indonesia masih memiliki pekerjaan besar pada ketujuh belas point yang telah menjadi kesepakatan bersama tersebut.

Pembangunan secara nasional akan tetap menjadi perdebatan dan perbincangan dengan didasarkan pada kebutuhan serta urgensi akan kebijakan yang di ambil. Kebijakan yang di dasarkan pada kepentingan Bersama dan bersifat adil akan membuat berbagai pihak menerima akan keputusan yang di buat oleh pemerintah. Mimbar mimbar intelektual dari berbagai perguruan tinggi di negeri ini di harapkan mampu meberikan ide ide serta masukan kepada

pemerintah terkait pembangunan serta membawa dan mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Keberlanjutan pembangunan Nasional sangat bergantung pada sektor Ekonomi yang menjadi vitalitas hal ini disebabkan karena ekonomi menjadi panglima dalam keberlangsungan pembangunan yang ada, serta segala sector serta berbagai aspek mulai dari Kesehatan, Pendidikan, budaya, pariwisata dan social masyarakat juga berkorelasi dengan ekonomi untuk itu langkah strategis pemerintah melalui lembaga lembaganya dengan berbagai kebijakan serta rencana yang disusun sangat berpengaruh bagaimana sebuah Negara menghadapi badai akan adanya pandemi Covid-19 dan tekanan internasional terkait kebijakan mitigasi covid dan lainnya. Pemenuhan akan suksesti SDG's juga bergantung pada sektor sektor tersebut. Kemudian elemen elemen pemerintahan juga harus saling bersinergi bahu membahu guna menjaga stabilitas pembangunan di berbagai sektor, kebijakan yang tepat diperlukan guna menghindari tumpang tindih kebijakan antar pemerintahan, selain itu untuk mencapai kesejahteraan bersama di era pandemi seperti ini. Fokus pembangunan pada sektor pemulihan ekonomi pasca pandemi di rasa lebih penting mengingat ekonomi menjadi jantung dari pembangunan yang ada. Nilai ekonomis pada infrastruktur harus di dasarkan oleh berbagai kepentingan dan berbagai aspek terkait keberlangsungan hidup manusia.

Ucapan Terimakasih

Ucapan syukur yang amat agung kami panjat dan haturkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan kekuatan untuk menyusun dan menyelesaikan jurnal ini, kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada anggota kelompok yang telah membantu menyempurnakan artikel ini melalui literatur yang mereka peroleh serta diskusi diskusi kecil di warung kopi mengenai pembangunan nasional di era pandemic dengan berbagai pandangan yang ada mengantarkan kami pada sebuah konklusi untuk menyelesaikan jurnal ini, kemudian ucapan terima kasih juga tidak lupa kami haturkan kepada penulis dan peneliti sebelumnya yang kami jadikan referensi untuk menjadi dasar dalam kerangka berfikir dalam menilai fenomena sosial politik terkait urgensi pembangunan yang terjadi di sekitar kami. Harapanya jurnal ini kedepanya juga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti yang mana membutuhkan data serta ide ide segar guna menyelesaikan penelitian selanjutnya, di era pandemi yang genting saat ini kami juga berharap bahwa dunia dan Indonesia khususnya akan lekas membaik serta mulainya kembali normal kehidupan manusia seperti dahulu lagi. Jayalah negriku jayalah indonesiaku.

Daftar Pustaka

https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Kebijakan-Perjalanan-di-Era-Pandemi-COVID_19

<https://www.sdg2030indonesia.org/>

<https://www.bps.go.id/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/amp/pr-01914221/ekonomi-indonesia-minus-349-persen-dikuartal-iii-2020-sri-mulyani-lebih-baik-dibanding-sebelumnya>

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsinf2020d3_en.pdf. Dipublikasikan tanggal 23 April 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

<https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf

Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1). <https://doi.org/10.36574/jPP.V4I1.108>.